RILIS PERS

PERINGATAN HARI HAM 2022: MASIH MINIMNYA PEMENUHAN HAM PENGUNGSI DI INDONESIA OLEH PEMERINTAH

(Jakarta, 12 Desember 2022) Pemerintah Indonesia adalah pemegang tanggung jawab utama dalam pemenuhan HAM bagi pengungsi yang ada di negara ini. Saat ini situasi pemenuhan HAM bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masih minim karena masih terbatasnya pemenuhan hak-hak dasar pengungsi.

“Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menjadi negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka utamanya di area Asia Pasifik, oleh karenanya Pemerintah Indonesia harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi pengungsi selama singgah di Indonesia”, tegas Atika Yuanita, Ketua Perkumpulan SUAKA.

“Peran masyarakat sipil menjadi penting untuk mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa upaya pemenuhan hak-hak dasar kepada para pengungsi, adalah tanggung jawabnya tetapi kerap kali terabaikan dan belum menjadi prioritas,” tambah Atika.

Perlindungan terhadap pengungsi, seperti hak untuk hidup, hak atas rasa aman dan hak untuk hidup berdampingan secara damai, hak mendapatkan bantuan hukum, merupakan hak yang universal, tidak terbatas pada status legalitas kewarganegaraan, serta melampaui suku, agama atau ras. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah maju dengan mengupayakan pemenuhan HAM dengan memberikan akses pendidikan kepada anak pengungsi namun upaya ini masih belum dapat menjawab permasalahan mendasar para pengungsi.

Pendekatan keamanan yang kerap kali digunakan pemerintah seharusnya ditinggalkan. Pendekatan ini justru telah memunculkan perspektif negatif atas keberadaan pengungsi di Indonesia.. Padahal keberadaan pengungsi dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi.

Per Juni 2022 sendiri, data UNHCR menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 13.098 orang pengungsi dan pencari suaka yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Somalia, dan Myanmar. Mayoritas pengungsi hidup di Indonesia dalam keterbatasan terutama karena mereka tidak bisa bekerja. Keengganan untuk melakukan meratifikasi Konvensi Pengungsi membuat Pemerintah Indonesia resisten dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak bagi kelompok minoritas ini.

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-74 ini sudah seharusnya menjadi momentum refleksi Pemerintah dalam pemenuhan dan perlindungan HAM bagi pengungsi. “Indonesia memiliki

kewajiban yang sangat penting dan bersifat konstitusional karena Indonesia berjanji untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial", tutup Roichatul Aswidah, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan SUAKA.

Narahubung:
Atika Yuanita Paraswaty: 081383399078
Dewi F Rahmasari: 08557227774